



NKRI DALAM BINGKAI NETWORK SOCIETY DAN STRONG STATE

Melvin Melanthon Simanjuntak
Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, Indonesia

email: melvin.stak@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel :

Diterima: 21-04-2026

Disetujui: 31-05-2026

Kata Kunci :

NKRI, Network Society, Strong State, Identitas Bangsa, Integritas Nasional

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola hubungan negara, masyarakat, dan warga negara. Indonesia sebagai negara-bangsa (*nation-state*) menghadapi paradoks yang semakin kompleks. Di satu sisi, ruang digital memperkuat demokratisasi informasi dan partisipasi publik. Di sisi lain, ruang yang sama menjadi arena kontestasi identitas yang berpotensi mengikis integritas nasional. Kajian ini bertujuan menganalisis posisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah dinamika identitas dalam masyarakat jaringan (*Network Society*) dengan menggunakan perspektif Manuel Castells dan konsep *Strong State* dari Francis Fukuyama. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yang dipresentasikan dalam format seminar akademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa menguatnya masyarakat jaringan menyebabkan identitas tidak lagi dibentuk secara dominan oleh institusi negara, tetapi oleh jaringan digital yang bersifat horizontal, cepat, dan lintas batas. Dalam kondisi demikian, negara dituntut tidak hanya memiliki legitimasi politik, tetapi juga kapasitas institusional yang kuat untuk mengelola keberagaman, membangun kepercayaan publik, serta menjaga integritas nasional tanpa mengorbankan demokrasi. NKRI memerlukan transformasi menuju negara yang adaptif terhadap era digital, bukan negara yang represif.

ARTICLE INFO

Article History :

Received : 21-04-2026

Accepted : 31-05-2026

ABSTRACT

Advancements in information technology have transformed the dynamics of the relationships between the state, society, and citizens. As a nation-state, Indonesia faces an increasingly complex paradox. On one hand, the digital space fosters the democratization of information and public participation. On the other, this same space serves as an arena for identity contestation that threatens to erode national integrity. This study aims to analyze the position of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) amidst identity dynamics within the "Network Society," drawing upon the perspectives of Manuel Castells and Francis Fukuyama's concept of the "Strong State." Employing a qualitative-descriptive library research method, the findings are presented in an academic seminar format. The study reveals that the rise of the network society means identities are no longer predominantly shaped by state institutions but by digital networks characterized by horizontal, rapid, and cross-border interactions. Under these conditions, the state is required to possess not only political legitimacy but also robust



Keywords:

NKRI, Network Society, Strong State, National Identity, National Integrity.

institutional capacity to manage diversity, build public trust, and safeguard national integrity without compromising democracy. Indonesia needs to transform into a state that is adaptive to the digital era, rather than one that is repressive.

PENDAHULUAN

Makalah ini telah disampaikan dalam Seminar Pengokohan 4 Pilar Kebangsaan MPR RI, Sabtu 12 Januari 2019 di Auditorium Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar dengan judul awal “NKRI Harga Mati Tapi Tak Matikan Rakyat Indonesia”. Mengingat judul semula sebagai konsumsi seminar nasional maka perlu diseleraskan, dikembangkan dan dimodifikasi kembali agar bisa sesuai dengan realitas sosial politik masyarakat yang semakin berkembang, maju, dan berubah. Karena itu dalam pengembangan ini dipandang dan dikaji ulang dengan menggunakan konsep sosiologi Manuel Castells yang dinamakan Masyarakat Jejaring, *Network Society*. Dengan begitu makalah ini mencoba untuk berangkat dari asumsi bahwa krisis Indonesia dewasa ini lebih banyak disebabkan runtuhnya modal sosial, melemahnya kepercayaan publik, dan disrupsi jaringan digital dibandingkan oleh keberagaman identitas itu sendiri. Perkembangan revolusi digital telah melahirkan bentuk masyarakat baru yang ditandai oleh dominasi jaringan informasi. Internet, media sosial, kecerdasan buatan, serta platform digital telah mengubah cara masyarakat membangun identitas, menyampaikan aspirasi politik, hingga membentuk opini publik. Negara tidak lagi menjadi satu-satunya produsen narasi kebangsaan. Ruang publik kini dipenuhi oleh berbagai aktor yang saling bersaing memperebutkan legitimasi melalui jaringan digital. Castells menyebut transformasi ini sebagai *Network Society*, yaitu struktur sosial yang diorganisasikan oleh jaringan informasi berbasis teknologi digital. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman etnis, agama, bahasa, budaya, dan kepentingan politik. Dalam konteks masyarakat jaringan, keberagaman tersebut dapat menjadi modal sosial yang memperkuat bangsa, tetapi juga berpotensi menjadi sumber fragmentasi apabila identitas dikelola melalui narasi eksklusif, polarisasi digital, dan disinformasi. Pada saat yang sama, globalisasi mengurangi kemampuan negara mengendalikan arus informasi. Negara menghadapi tantangan baru berupa penyebaran hoaks, radikalisme digital, politik identitas, dan intervensi aktor transnasional. Dalam kondisi demikian, konsep *Strong State* yang dikemukakan Francis Fukuyama menjadi relevan. Negara yang kuat bukanlah negara yang otoriter, melainkan negara yang memiliki kapasitas institusional tinggi, tata kelola yang efektif, birokrasi profesional, supremasi hukum, dan kemampuan melaksanakan kebijakan secara konsisten. Persoalan mendasar yang kemudian muncul adalah bagaimana NKRI mempertahankan integritas bangsa ketika identitas masyarakat semakin dibentuk oleh jaringan digital yang tidak mengenal batas negara.

METODE

Kajian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Analisis dilakukan melalui sintesis terhadap teori Manuel Castells mengenai *Network Society* dan teori Francis Fukuyama mengenai *Strong State*. Data diperoleh dari buku, artikel jurnal



ilmiah, dan literatur akademik yang relevan. Hasil analisis disusun dalam format seminar ilmiah untuk menghasilkan argumentasi konseptual mengenai hubungan antara identitas bangsa, integritas nasional, masyarakat jaringan, dan kapasitas negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Sosiologis Kritis Dan Ideologis

Menurut Manuel Castells, masyarakat modern telah bertransformasi menjadi masyarakat jaringan (*network society*), yaitu masyarakat yang aktivitas ekonomi, politik, budaya, dan sosialnya dimediasi oleh jaringan informasi digital. Kekuasaan tidak lagi hanya dimiliki oleh negara, tetapi juga oleh aktor-aktor yang mampu mengendalikan arus informasi. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini terlihat sangat jelas. **Pertama**, demokrasi Indonesia semakin dipengaruhi oleh *platform* digital. Kampanye politik, pembentukan opini publik, hingga mobilisasi massa tidak lagi bergantung pada struktur partai politik semata, tetapi pada media sosial dan algoritma *platform* digital. Kekuasaan komunikasi bergeser dari birokrasi menuju ekosistem digital yang sebagian besar dikendalikan perusahaan teknologi global. **Kedua**, ekonomi Indonesia semakin terkoneksi melalui jaringan digital. Perdagangan elektronik, ekonomi kreatif, *fintech*, kecerdasan buatan, hingga ekosistem *startup* menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak lagi bergantung sepenuhnya pada sumber daya fisik, melainkan pada konektivitas informasi. **Ketiga**, masyarakat sipil memperoleh ruang partisipasi yang lebih luas. Berbagai gerakan sosial dapat muncul secara spontan melalui jaringan digital tanpa struktur organisasi formal. Fenomena ini memperlihatkan bahwa legitimasi negara tidak lagi hanya dibangun melalui institusi politik, tetapi juga melalui kemampuan negara mengelola komunikasi publik.



Gambar 1. Tim Pengabdi Sedang Memaparkan Materi

Namun perspektif **Network Society** juga mengungkap berbagai kerentanan NKRI. Indonesia mengalami banjir informasi (*information overload*) yang mempermudah penyebaran hoaks, disinformasi, propaganda politik, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial. Algoritma media sosial sering kali memperkuat identitas kelompok daripada membangun solidaritas nasional. Selain itu, kedaulatan digital Indonesia juga menghadapi tantangan serius. Sebagian besar infrastruktur digital, pusat data global, mesin pencari, media sosial, hingga kecerdasan buatan masih didominasi perusahaan multinasional. Dalam kondisi seperti ini, negara tidak sepenuhnya mengendalikan ruang publik digitalnya sendiri. Dengan demikian, perspektif **Network Society**



menunjukkan bahwa ancaman terhadap NKRI tidak lagi hanya berupa invasi militer, tetapi juga berupa perang informasi, manipulasi algoritma, dominasi platform digital, serta kolonialisme data. Konsep *Strong State* menekankan bahwa negara harus memiliki kapasitas institusional yang kuat untuk menjalankan hukum, mengendalikan birokrasi, menjaga keamanan, serta memastikan pembangunan berjalan efektif. Indonesia memiliki karakteristik sebagai negara yang sangat besar, terdiri atas ribuan pulau, ratusan kelompok etnis, dan tingkat kesenjangan wilayah yang masih tinggi. Dalam kondisi demikian, keberadaan negara yang kuat bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Negara yang lemah akan menghasilkan fragmentasi politik, konflik identitas, korupsi, lemahnya penegakan hukum, serta meningkatnya separatisme. Keunggulan perspektif *Strong State* terlihat pada beberapa aspek. **Pertama**, negara memiliki legitimasi konstitusional untuk menjaga integrasi nasional melalui pertahanan, keamanan, penegakan hukum, serta perlindungan wilayah kedaulatan. **Kedua**, pembangunan nasional membutuhkan koordinasi birokrasi yang hanya dapat dilakukan oleh negara yang memiliki kapasitas administratif tinggi. **Ketiga**, negara berperan sebagai regulator terhadap kekuatan pasar maupun perusahaan digital global yang sering kali memiliki kekuatan ekonomi melebihi banyak negara berkembang.



Gambar 2. Peserta Sedang Mendengarkan Narasumber

Namun demikian, konsep *Strong State* juga memiliki keterbatasan. Negara yang terlalu dominan berpotensi melahirkan birokrasi yang tertutup, sentralisasi kekuasaan, pembatasan kebebasan sipil, hingga melemahnya inovasi masyarakat. Dalam era digital, negara tidak lagi mampu mengontrol informasi secara sepihak sebagaimana pada era komunikasi konvensional. Upaya mengendalikan ruang digital melalui pendekatan koersif justru sering memunculkan resistensi publik. Karena itu, ukuran negara kuat pada abad ke-21 tidak lagi terletak pada besarnya aparat keamanan, melainkan pada kapasitas negara membangun kepercayaan publik (*public trust*), tata kelola digital, kualitas birokrasi, dan kemampuan berkolaborasi dengan masyarakat. Perdebatan antara *Network Society* dan *Strong State* sesungguhnya merupakan dikotomi yang semakin kehilangan relevansi. Indonesia membutuhkan sintesis keduanya. Negara yang kuat tetapi tidak memahami logika jaringan akan kehilangan legitimasi karena tertinggal oleh perubahan teknologi. Sebaliknya, masyarakat jaringan tanpa negara yang kuat akan menghasilkan fragmentasi, disinformasi, oligarki digital, dan lemahnya perlindungan terhadap kepentingan nasional. Sintesis tersebut dapat disebut sebagai **Networked Strong State**, yaitu negara yang memiliki kapasitas institusional tinggi sekaligus mampu beroperasi dalam logika jaringan digital. Dalam model ini, kekuatan negara tidak diwujudkan melalui kontrol absolut, melainkan melalui



kemampuan mengorkestrasi berbagai jaringan sosial, ekonomi, teknologi, dan politik. Negara bertindak sebagai *network orchestrator* yang menghubungkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas digital, masyarakat sipil, media, serta komunitas internasional.

Di sisi lain, masyarakat tetap memperoleh ruang partisipasi yang luas melalui mekanisme demokrasi digital yang transparan dan akuntabel. Bagi Indonesia, sintesis ini memiliki beberapa implikasi strategis. **Pertama**, pembangunan kapasitas negara harus diarahkan pada transformasi digital birokrasi, bukan sekadar digitalisasi layanan administrasi. **Kedua**, keamanan nasional harus diperluas mencakup keamanan siber, perlindungan data, keamanan informasi, dan ketahanan terhadap perang kognitif. **Ketiga**, kedaulatan nasional harus dimaknai sebagai kemampuan mengendalikan data strategis, infrastruktur digital, serta kecerdasan buatan, bukan hanya penguasaan wilayah fisik. **Keempat**, demokrasi Indonesia harus bergeser menuju demokrasi kolaboratif (*collaborative governance*) yang memanfaatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik. **Kelima**, negara harus membangun literasi digital sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional karena ancaman terbesar masa depan bukan hanya perang senjata, tetapi perang informasi. Paradigma pembangunan Indonesia masih didominasi cara pandang negara industrial abad ke-20, sementara tantangan yang dihadapi telah bergeser menjadi persoalan masyarakat jaringan abad ke-21. Banyak kebijakan publik masih mengukur kekuatan negara dari aspek birokrasi, regulasi, dan kontrol administratif, padahal sumber kekuasaan kini juga terletak pada kemampuan mengelola data, membentuk narasi, mengembangkan inovasi, dan membangun kepercayaan. Pada saat yang sama, tidak tepat pula menganggap digitalisasi akan secara otomatis memperkuat demokrasi. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa ruang digital juga dapat dimanfaatkan untuk polarisasi politik, manipulasi opini, penyebaran hoaks, hingga penguatan oligarki *platform*. Artinya, masyarakat jaringan bukanlah ruang yang netral, melainkan arena kontestasi kekuasaan baru. Karena itu, kekuatan negara di era digital tidak dapat lagi dipahami sebagai dominasi atas masyarakat, tetapi sebagai kemampuan mengarahkan ekosistem jaringan agar menghasilkan nilai publik. Negara yang terlalu lemah akan kehilangan kedaulatan kepada korporasi digital global, sedangkan negara yang terlalu kuat berisiko menghambat kreativitas, inovasi, dan partisipasi warga. Keseimbangan antara kapasitas negara dan keterbukaan jaringan menjadi syarat utama bagi ketahanan nasional.

KESIMPULAN

NKRI sedang menghadapi perubahan mendasar dalam relasi antara negara, masyarakat, dan identitas bangsa. Dalam perspektif Manuel Castells, masyarakat Indonesia telah memasuki era **Network Society** yang menjadikan jaringan informasi sebagai arena utama pembentukan identitas, distribusi kekuasaan, dan pertarungan makna. Akibatnya, identitas kebangsaan tidak lagi menjadi satu-satunya identitas dominan karena harus berkompetisi dengan identitas keagamaan, etnis, politik, maupun identitas virtual yang dibentuk melalui algoritma platform digital. Dalam situasi tersebut, konsep **Strong State** Francis Fukuyama menjadi sangat relevan. Integritas nasional tidak akan terjaga melalui perluasan kontrol negara semata, melainkan melalui peningkatan kapasitas institusional, kualitas birokrasi, supremasi hukum, tata kelola digital yang akuntabel, serta kemampuan negara membangun kepercayaan publik. Negara yang kuat bukan negara yang paling represif, tetapi negara yang paling efektif, adaptif, dan legitimate. Secara konseptual, teori Castells dan Fukuyama memperlihatkan bahwa krisis identitas dalam masyarakat jaringan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan keamanan. Negara harus mampu menjadi aktor strategis yang menghubungkan berbagai jaringan sosial melalui narasi kebangsaan yang inklusif, pelayanan publik yang berkualitas, dan tata kelola digital yang demokratis. Dengan demikian, masa depan NKRI bergantung pada keberhasilannya mentransformasikan diri dari negara administratif menjadi negara jejaring (*networked state*) yang memiliki kapasitas kuat



sekaligus menghormati kebebasan warga negara. Pemerintah perlu membangun strategi nasional mengenai digital nation-building yang menjadikan literasi digital, pendidikan Pancasila, dan kewarganegaraan digital sebagai fondasi pembentukan identitas nasional di era masyarakat jaringan. Reformasi birokrasi harus diarahkan pada penguatan kapasitas negara (*state capacity*), bukan sekadar penyederhanaan struktur organisasi. Negara yang lemah secara institusional akan selalu tertinggal dari kecepatan perubahan teknologi. Regulasi ruang digital perlu bergeser dari pendekatan reaktif menuju tata kelola berbasis kolaborasi (*collaborative governance*), dengan melibatkan akademisi, masyarakat sipil, media, dan perusahaan teknologi agar negara tidak kehilangan legitimasi dalam mengelola ruang publik digital. Secara kritis, ancaman terbesar bagi NKRI bukan semata politik identitas, melainkan melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ketika negara gagal menghadirkan keadilan, pelayanan yang efektif, dan penegakan hukum yang konsisten, masyarakat akan mencari identitas alternatif di luar negara. Dalam kondisi demikian, disintegrasi tidak lagi diawali oleh pemisahan wilayah, tetapi oleh terputusnya ikatan psikologis antara warga negara dan negara itu sendiri. Oleh sebab itu, menjaga integritas bangsa pada abad ke-21 harus dimulai dengan memperkuat kualitas institusi negara, bukan sekadar memperbanyak simbol-simbol nasionalisme.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdi mengucapkan terimakasih pimpinan dan seluruh civitas akademik Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar atas diberikannya kesempatan untuk dapat melaksanakan penelitian dan atas segala kontribusi baik secara materil dan moril.

REFERENSI

- Bevir, Mark (2010). *Democratic Governance*. New Jersey : Princeton University Press
- Castells, M. (1996). *The Rise of the Network Society: The information Age: Economy, Society, and Culture* (Vol. 1). Blackwell Publishers.
- Castells, M. (1997). *The Power of Identity: The Information Age: Economy, Society, and Culture* (Vol. 2). Blackwell Publishers.
- Castells, M. (1998). *End of millennium: The Information Age: Economy, Society, and Culture* (Vol. 3). Blackwell Publishers.
- Fitiasari, Susan. (2012). *Transformasi 4 Pilar Kebangsaan*. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- Fukuyama, F. (2004). *State-building: Governance and World Order in the 21st Century*. Cornell University Press.
- Kansil, C.S.T. (2012). *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. Rineka Cipta.
- MPR RI. (2012). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Sekretariat Jenderal MPR RI.